



TESIS

Judul:

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gugatan Eksekusi
Lelang
Dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum
Tetap : Tinjauan Plurium Litis Consortium
dan Niet Ontvankelijke Verklaard

Disusun oleh:

ZILDJIAN ADITYA MUDA
NIM. 207231025

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP GUGATAN
EKSEKUSI LELANG DALAM KEPAILITAN YANG BELUM
BERKEKUATAN HUKUM TETAP: TINJAUAN PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Zildjian Aditya Muda

NIM: 207231025

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2025

Pengesahan

Nama : ZILDJIAN ADITYA MUDA
NIM : 207231025
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gugatan Eksekusi Lelang Dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap : Tinjauan Plurium Litis Consortium dan Niet Ontvankelijk Verklaard
Title : Legal Accountability for Execution Auction Lawsuits in Bankruptcy Without Final and Binding Legal Force: A Review of Plurium Litis Consortium and Niet Ontvankelijk Verklaard

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

Persetujuan

Nama : ZILDJIAN ADITYA MUDA
NIM : 207231025
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gugatan Eksekusi
Lelang Dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum
Tetap : Tinjauan Plurium Litis Consortium dan Niet
Ontvankelijke Verklaard

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-Desember-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Kepailitan dan eksekusi lelang aset merupakan isu hukum yang sering memicu konflik antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam konteks aset yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terkait gugatan eksekusi aset benda dalam kepailitan, dengan fokus pada konsep *Plurium Litis Consortium* (kekurangan pihak) dan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang memadukan kajian teoretis dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian prinsip *Plurium Litis Consortium* dapat mengakibatkan cacat formil dalam gugatan, sehingga memengaruhi validitas dan efektivitas proses hukum. Selain itu, penerapan konsep *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam kasus kepailitan sering kali disebabkan oleh kelalaian dalam pemenuhan syarat-syarat formal, seperti identifikasi pihak terkait dan kelengkapan dokumen. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum acara perdata di kalangan praktisi untuk mengurangi risiko gugatan tambahan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Dengan memberikan analisis yang mendalam tentang hubungan antara hukum acara perdata dan praktik kepailitan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Kata kunci: Kepailitan, eksekusi lelang, *Plurium Litis Consortium*, *Niet Ontvankelijke Verklaard*, hukum acara perdata.

ABSTRACT

Bankruptcy and asset auction execution often trigger legal conflicts among the involved parties, particularly regarding assets that have not attained legal certainty (inkracht). This research aims to analyze legal accountability in lawsuits related to asset execution in bankruptcy cases, focusing on the concepts of Plurium Litis Consortium (lack of parties) and Niet Ontvankelijke Verklaard (inadmissible lawsuits). The study employs an empirical juridical method, combining theoretical reviews and analyses of relevant court rulings.

The findings reveal that neglecting the principle of Plurium Litis Consortium can lead to procedural defects in lawsuits, affecting their validity and the effectiveness of legal proceedings. Furthermore, the application of Niet Ontvankelijke Verklaard in bankruptcy cases often arises from failures to meet formal requirements, such as identifying relevant parties and providing complete documentation. The study underscores the importance of enhancing procedural law understanding among legal practitioners to minimize additional lawsuits and expedite dispute resolution.

By providing an in-depth analysis of the intersection between procedural law and bankruptcy practices, this research aims to serve as a reference for academics, legal practitioners, and policymakers in developing a more equitable and efficient legal system.

Keywords: *Bankruptcy, asset auction, Plurium Litis Consortium, Niet Ontvankelijke Verklaard, procedural law.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul *“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gugatan Eksekusi Lelang Dalam Kepailitan Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap: Tinjauan Plurium Litis Consortium Dan Niet Ontvankelijke Verklaard”*.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sehingga penulis dapat mencapai gelar Magister Hukum.

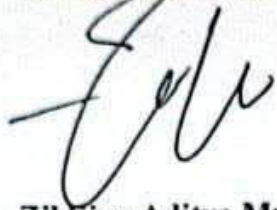
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, sebagai suri teladan dalam kehidupan.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan dukungan moril maupun materil hingga tesis ini selesai. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Rektor Universitas Tarumanagara, Dekan dan Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan studi ini;
3. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IP.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Christine T. S. Kansi, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas;
7. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan dan dukungan fasilitas yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Orang Tua terhormat dan tercinta, ayah penulis Maryana dan ibu penulis Dyah Widowati serta kakak yang disayangi Zildjian Adha Pramudya, yang telah banyak berkorban demi anaknya dalam menuntut ilmu, dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, support, dan doa kepada penulis;
9. Saudara tersaksi penulis, Iva Cahyani, atas bantuan, semangat dan dukungan fisik dan mental yang diberikan selama proses penulisan tesis pada khususnya, dan dalam keseharian penulis pada umumnya;
10. Sahabat penulis, sahabat gigih di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Cristian, Vandes, Hafidzh, dll atas bantuan dan dukungannya selama proses penulisan tesis dan juga selama waktu penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. **Teman-teman penulis** yang selalu memberikan support selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,;
12. **Rekan kerja penulis Anwar, Hafidzh, Tanzul, Rudi, Furqon, Udin, Nurul, Dede, Faisal, Adam, Andre, Nurhalimah** yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama menjalani pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. **Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya** yang penulis yakin telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, 15 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zildjian Aditya Muda', written in a cursive style.

Zildjian Aditya Muda

Pernyataan

Nama : ZILDJIAN ADITYA MUDA
NIM : 207231025
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gugatan Eksekusi
Lelang Dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum
Tetap : Tinjauan Plurium Litis Consortium dan Niet
Ontvankelijke Verklaard

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26-Desember-2024
Yang menyatakan



ZILDJIAN ADITYA MUDA
NIM. 207231025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Kerangka Konseptual	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	29
E. Metode Penelitian	35
F. Teknik Analisis Data	45
G. Sistematika penulisan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	54
A. Tinjauan Teori Kepastian Hukum, Kepailitan, Eksekusi Jaminan.....	54
B. Tinjauan Eksekusi Jaminan melalui Lelang	64
C. Plurium Litis Consortium dan Cacat Formil (Niet Ontvankelijk Verklaard)	72
D. Prinsip Hukum Perdata terkait gugatan dan eksekusi Hak Tanggungan.....	91
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	100
A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Eksekusi Jaminan pada Kasus Kepailitan	100

B. Analisis Penerapan Plurium Litis Consortium dalam Gugatan Eksekusi Jaminan.....	106
C. Penerapan Cacat Formil (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Eksekusi Jaminan.....	108
D. Hubungan Antara Eksekusi Jaminan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Kreditur.....	109
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	123
A. Permasalahan Pertanggungjawaban Hukum dalam Eksekusi Jaminan terhadap Aset dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap. ..	123
B. Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Eksekusi Jaminan atas Aset dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap.....	134
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	145

DAFTAR SINGKATAN

NO	: Niet Ontvankelijke Verklaard
UUHT	: Undang-Undang Hak Tanggungan
UUK	: Undang-Undang Kepailitan
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Tesis dan Hasilnya
- Lampiran 5 : Publikasi Jurnal dan hasil penilaian Turnitin
- Lampiran 6 : Putusan_30_pdt_2024_pt_pbr_20241220220103
- Lampiran 7 : Putusan_90_pdt.g_2023_pn_gsk_20241220215732
- Lampiran 8 : Putusan_236_pdt.g_2023_pn_blb_20241220220151
- Lampiran 9 : Putusan_122_pdt.g_2023_pn_plk_20241217003331
- Lampiran 10 : Putusan_62_pdt.g_2023_pn_trg_20241217004419
- Lampiran 11 : putusan_89_pdt.g_2024_pn_smn_20241217001843